

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok Swadaya Wanita, yang disingkat KSW, merupakan salah satu program dari Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS). YSBS didirikan di Kota Cilacap pada tahun 1976 atas dasar usaha untuk memberantas kemiskinan, mencerdaskan bangsa, dan membantu masyarakat kurang mampu supaya bisa mendapatkan makanan yang bergizi.

KSW adalah usaha *micro credit* yang bertujuan memberdayakan wanita melalui usaha simpan pinjam. Kekhasan yang sekaligus membedakannya dari usaha simpan pinjam lainnya terletak pada pemberdayaan wanita melalui penguatan kelompok atau komunitas basis.

Komunitas basis tersebut dibangun oleh ibu-ibu sendiri, yang juga membedakan KSW dengan usaha simpan pinjam lainnya, yang terletak pada pengambilan keputusan mengenai aturan atau tata tertib simpan pinjam, besarnya bunga, dll. Semua ketentuan tersebut dibuat dan disetujui oleh kelompok, di mana kelompok tersebut kurang lebih terdiri dari 15 orang.

Melihat sebuah Liputan Usaha yang berjudul *Kisah Sukses Kelompok Swadaya Wanita* yang dikutip dari Majalah Buletin Volume IV (2012: 9), yaitu mengenai kelompok aktif yang sudah sukses dan menjadi

kelompok-kelompok binaan yang karena ketepatannya dalam pembayaran serta kekompakkannya terpilih untuk *pilot project* kerjasama dengan KIVA (salah satu lembaga pinjaman tanpa bunga yang berlokasi di Amerika).

Kelompok yang bernama Flamboyan ini beranggotakan 14 orang berdiri sejak tahun 2007, berlokasi di Jl. Slamet RT 21/RW 03, Kecamatan Kroya – Kabupaten Cilacap. Bidang usaha masing-masing anggota kelompok ini terutama adalah memproduksi dan menjual makanan tradisional khas Jawa, seperti: dadar gulung, arem-arem, pastel basah, gethuk lindri, carang gesing, nagasari, dll. Namun, ada juga yang memiliki bisnis berjualan baju di Pasar Kroya.

Solidaritas kelompok ini terjalin sangat erat karena mereka saling mengisi dan melengkapi jenis makanan ketika mendapat pesanan makanan ringan / *snack*. Mereka mengadakan pertemuan rutin setiap bulan dan selalu bergantian di rumah tiap anggota. Kelompok ini menjadi sebuah komunitas para ibu yang memiliki usaha meningkatkan pendapatan keluarga dan menjadi ajang untuk saling berbagi dan menguatkan. Besar angsuran masing-masing anggota berbeda, tergantung besarnya dana yang dipinjam.

Menurut Putnam, dalam Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam bukunya *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (Community Development)* (2006: 363) bahwa semua pengembangan masyarakat seharusnya bertujuan untuk membangun masyarakat.

Pengembangan masyarakat melibatkan pengembangan modal sosial, memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan mereka, dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, pemahaman dan aksi sosial. Hilangnya komunitas telah mengakibatkan perpecahan, isolasi, dan individualisasi, dan pengembangan masyarakat mencoba membalik efek-efek ini. Pengembangan masyarakat sangat diperlukan jika pembentukan struktur dan proses level masyarakat yang baik dan langgeng ingin dicapai.

Pengembangan masyarakat sejatinya merupakan sebuah proses. Dalam mengevaluasi proyek pengembangan masyarakat, siapapun harus melihat proses, dan dalam merencanakan dan menerapkan program pengembangan masyarakat apa pun senantiasa merupakan proses, bukan hasil, yang harus diberikan pertimbangan yang mendalam. Orang-orang menekankan pada 'pernyataan hasil' perlu menyadari bahwa untuk pengembangan masyarakat, proses yang baik merupakan 'hasil' terpenting yang dapat dicapai. Pengembangan masyarakat perlu mengupayakan pembentukan cara berpikir yang menghargai saling interaksi di antara masyarakat, menghargai kualitas pengalaman kolektif, dan memaksimalkan potensi mereka dan mencapai perikemanusiaan mereka secara utuh melalui pengalaman proses masyarakat (Jim dan Frank, 2006: 365).

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pengembangan masyarakat melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk

saling bekerja, mengembangkan struktur yang berarti orang-orang menjadi lebih tergantung satu sama lain untuk mencapai segala sesuatu, dan mencari cara yang saling memberi pengaruh juga kepada orang lain. Oleh karena itu, gagasan tentang pengembangan masyarakat dapat dan sekiranya meluas ke semua proses pengembangan masyarakat.

Dalam membahas pengembangan masyarakat, Jim dan Frank (2006: 474) juga mengatakan bahwa sangat penting untuk melibatkan pertumbuhan personal (*personal growth*) dan pengembangan personal (*personal development*). Salah satu justifikasi utama untuk pengembangan masyarakat, yaitu bahwa masyarakat merupakan konteks yang lebih baik untuk pengembangan personal daripada struktur birokrasi yang lebih impersonal dari pemerintahan yang besar dan bisnis yang besar. Kerugian masyarakat sangat erat kaitannya dengan kerugian identitas personal karena melalui rasa memiliki, seseorang dalam sebuah masyarakat akan menumbuhkan rasa nilai personal dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang harus didasari oleh pengembangan personal dari masing-masing masyarakat, maka dari itu dimulai dengan pengembangan dari sisi wanita di KSW yang dikelola oleh YSBS di Cilacap. Berbicara mengenai wanita, timbullah pertanyaan mengapa dikhususkan kepada kelompok wanita saja? Sebagai pendiri YSBS, Pastor Carolus berpikir bahwa baik adanya bila wanita memiliki penghasilan sendiri, dan merasa berharga, serta berguna, daripada

bergantung hanya dari penghasilan suaminya saja. Hasil survei yang pernah beliau lakukan membuktikan bahwa memberikan pinjaman kepada wanita cenderung lebih membuahkan hasil daripada memberikan pinjaman kepada pria. Hal tersebut disimpulkan beliau dengan pemikiran bahwa seorang ibu akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, dalam artian lebih mengutamakan sang anak di atas kepentingannya sendiri, sementara ayah / pria pada umumnya lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri. Oleh karena itu, wanita diharapkan untuk berada pada situasi dimana mereka harus lebih percaya diri dan memperjuangkan hak-haknya supaya dapat setara dengan pria, karena sulit dipungkiri, situasi tetap mengatakan bahwa wanita tidak setara dengan pria.

Menurut Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia dalam buku *Engendering Development: Pembangunan Perspektif Gender* (Anonim, 2005: 2), gender merujuk pada peran dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam melalui proses sosialisasi dan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki memang berbeda secara biologis tetapi perbedaan biologis ini kemudian ditafsirkan dan dikembangkan sedemikian rupa oleh setiap kebudayaan menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan berkegiatan, serta apa hak, sumber daya, dan kekuasaan yang mereka miliki. Kendati tuntutan ini sangat bervariasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, terdapat sejumlah persamaan yang mencolok. Misalnya, hampir semua

masyarakat memberikan tanggung jawab pengasuhan anak kepada perempuan, sementara untuk urusan kemiliteran dan pertahanan negara kepada laki-laki.

Ketidaksetaraan gender sangat merugikan kesehatan maupun kesejahteraan laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan berdampak terhadap kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga mengurangi produktivitas di sektor pertanian dan perusahaan-perusahaan sehingga memperkecil prospek pengentasan kemiskinan dan menjamin pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan gender juga melemahkan tata pemerintahan suatu negara yang berarti juga mengurangi efektifitas kebijakan pembangunannya (Anonim, 2005: 8).

Definisi tentang kerja menurut Moore dalam Anonim (2005: 14) sering kali tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga menyangkut kondisi yang melatarbelakangi kerja tersebut, serta penilaian sosial yang diberikan terhadap pekerjaan tersebut. Dalam masyarakat kita sekarang yang telah mengalami komersialisasi serta berorientasi pasar ini sering kali diadakan pembedaan yang ketat antara kerja upahan atau kerja yang menghasilkan pendapatan dan kerja bukan-upahan atau kerja yang tidak mendatangkan pendapatan. Kerja upahan dianggap kerja yang produktif, sedangkan kerja bukan upahan dianggap sebaliknya. Dalam situasi seperti ini bisa dipahami mengapa kerja perempuan sering kali tidak tampak (*invisible*) karena dalam masyarakat kita (walaupun tidak di semua masyarakat) keterlibatan perempuan sering

kali berada dalam pekerjaan yang tidak membawa upah atau tidak dilakukan di luar rumah (walaupun mendatangkan penghasilan). Walaupun kedengarannya cukup kasar, pendapat A.C. Pigou, seorang ahli ekonomi, menggambarkan keadaan ini dengan cukup lugas:

“apabila semua laki-laki kawin dengan pembantu rumah tangga mereka, indikator (statistik) akan menunjukkan turunnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan pengurangan dalam pendapatan nasional. Karena, sebagai ibu rumah tangga, mereka tidak akan didaftar lagi sebagai penghasil upah dan dengan demikian tidak akan diperhitungkan dalam statistik nasional. Mereka menjadi “perempuan yang tak tampak”. Mereka tidak dianggap sebagai orang yang bekerja atau sebagai penghasil nafkah dan dengan demikian dianggap tak produktif. Ini justru disebabkan kerja rumah tangga bukan merupakan kerja upahan, dengan demikian tidak diakui sebagai kerja” (dikutip oleh Hong dalam Saptari dan Holzner, 1997: 14-15).

Pandangan Saptari dan Holzner (1997: 334) bahwa upah perempuan “dapat” lebih rendah daripada upah laki-laki karena upah perempuan merupakan tambahan upah lelaki yang merupakan “pencari nafkah” perlu dipertanyakan. Hal tersebut dikarenakan, penghasilan ganda pada rumah tangga pedesaan sering kali juga tidak cukup untuk menyokong hidup yang layak sebab secara umum di Indonesia tingkat upah rendah, (kalau tidak, tenaga kerja di bawah umur tidak mungkin sebanyak itu), dan tidak semua perempuan di Indonesia memperoleh pendapatan lelaki/suami (15% dari perempuan di Indonesia merupakan kepala rumah tangga). Disisi lain, apabila laki-laki mengambil pendapatan dari perempuan, patriarki mempunyai dasar materiil yang kuat. Apabila hubungan dalam rumah tangga (dan ideologi yang mengatur hubungan rumah tangga dan hubungan lelaki-perempuan)

memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk mengontrol tenaga kerja perempuan, yaitu dapat menuntut jenis kerja tertentu dalam jumlah tertentu dan pelayanan-pelayanan tertentu sekaligus kualitas pekerjaan tertentu, patriarki juga akan kuat. Banyak konflik rumah tangga dan kekerasan laki-laki terjadi berkaitan erat dengan soal pengontrolan kerja. Perempuan mempunyai sumber daya dalam bentuk pemilikan dan non-materiil, yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk dapat hidup dan bekerja, yang membantu mereka memperoleh otonomi untuk melawan struktur patriarki yang mensubordinasikan mereka.

Pernyataan-pernyataan tersebut diatas sesuai dengan pernyataan Bapak Sumarsono selaku ketua KSW, bahwa merupakan suatu kendala saat menghadapi kasus internal dari salah satu kelompok, misalnya seperti masalah dalam rumah tangga seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), atau masalah situasi, seumpama ketika hasil tangkapan dari seorang nelayan sepi. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kelangsungan anggota, sehingga yang awalnya sudah menerima pinjaman dan mengikuti pertemuan pertama, tiba-tiba hilang kabar entah kemana.

Adapun halnya kesulitan yang ada pada KSW ini bahwa meski pada saat pertama ajakan pembentukan kelompok ini tidak sulit, namun karena saat ini telah banyak bank dengan berbagai macam program kredit yang bervariasi, membuat masyarakat setempat tergiur untuk lebih

memilih ke arah sana. Kendati saat ini, pemerintah sudah memiliki kebijakan memberikan semacam penghasilan tambahan untuk para ibu.

YSBS menyadari bahwa semua usaha yang dilakukan atas dasar kasih dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pasti akan membuahkan hasil. Namun tak dipungkiri tentu banyak rintangan yang menghadang dan kerikil yang dapat setiap saat menyandung. Berkembangnya pola pikir masyarakat ke arah yang lebih modern pada suatu daerah, tentu saja merupakan semacam prestasi dan menunjukkan kemauan masyarakat untuk maju dan bersaing. Bak secercah harapan untuk ke arah yang lebih baik. Semua pihak kiranya perlu memandang positif hal ini.

Setiap usaha yang dilakukan untuk mengembangkan masyarakat membutuhkan *monitoring*, evaluasi, dan penetapan langkah selanjutnya yang perlu ditempuh. Dengan memikirkan untung dan ruginya, dan juga efektifitasnya bagi masyarakat. Jangan sampai suatu program menuntut kejelian masyarakat dan pada akhirnya membuat tidak nyaman apabila tidak tepat pada sasaran yang dituju.

Meretas perbedaan, menyatukan pendapat hingga membuat solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Cilacap membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Maka YSBS melalui KSW mengambil langkah untuk mengiringi perkembangan pola pikir masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh tim KSW antara lain dengan membina masyarakat yang terbentuk di dalam kelompok, misalnya dengan pembinaan tentang

menggulirkan uang. Pembinaan ini bertujuan agar usahanya, walaupun kecil, tetap bisa lancar dan dapat menghasilkan. Sebelum kelompok tersebut terbentuk, tim KSW harus *kulo nuwun* terlebih dahulu kepada perangkat desa yang ada di masing-masing daerah. Setelah itu barulah dijelaskan mengenai manajemen di dalam program.

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam dari program KSW, sehingga dengan mempelajari karakter dari masyarakat dan dalam mengkomunikasikan lebih lanjut dengan masyarakat setempat sehingga KSW dapat berkembang menjadi seperti sekarang ini. Perlu diketahui bahwa masyarakat disini termasuk dalam golongan masyarakat perekonomian rendah atau minim. Maka dari itu, bantuan dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang khususnya dikalangan kaum wanita ini sangatlah bermanfaat adanya. Hal ini berkaitan dengan proses perubahan perilaku yang justru dapat membantu memajukan masyarakat. Contohnya saja, ketika pembentuk awal sebuah KSW, dengan memahami tipe masyarakatnya, akan cukup sulit untuk mengubah perilakunya yang sudah terbentuk dengan kekentalan budaya dari pucuk asalnya. Maka dari itu, tim KSW membicarakan pada orang-orang yang memiliki pengaruh di lingkungan tersebut yang kemudian akan mengkomunikasikan dengan caranya sendiri kepada orang lain (*mouth to mouth*). Hal tersebut sangat berpengaruh kepada masyarakat lainnya untuk mau ikut serta di dalam program pemberdayaan masyarakat ini.

Dalam penelitian ini, strategi komunikasi diperlukan terkait dengan tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk mengubah perilaku. Dalam artian mengubah perilaku masyarakat dari yang tidak mampu menjadi mampu, yang kaitannya dengan ranah komunikasi. Contohnya saja seperti salah satu kasus bahwa terkadang dalam suatu kelompok ada yang tidak bisa hadir atau datang terlambat dalam menghadiri pertemuan kelompok karena harus membantu tetangganya mengurus kondangan, dsb. Maka dari itu, strategi komunikasi disini digunakan untuk membujuk anggota bahwa waktu pertemuan tidak ada yang boleh datang terlambat atau bahkan malah sama sekali tidak bisa hadir.

Penyampaian pemahaman juga membutuhkan strategi dimana bisa disama artikan dengan pemberian ilmu atau penyuluhan. Ketika ada penyuluhan, sangat besar harapannya apabila keseluruhan anggota dapat hadir, sehingga mengerti arah dan tujuan organisasi. Contohnya dalam memberikan kemampuan untuk administrasi misalnya. Hal-hal yang sekiranya kecil dan *sepele* justru dapat menimbulkan suatu kesenjangan. Dari kesenjangan tersebut akan berpengaruh ke dalam pengembangan sebuah organisasi. Maka dikatakan bahwa strategi sangatlah perlu adanya.

Peneliti ingin meneliti dan melihat lebih jauh strategi komunikasi seperti apa yang ada dan digunakan oleh YSBS sehingga program pemberdayaan masyarakat ini dapat terjalin, terwujud, dan bahkan merubah perilaku masyarakat menuju masa depan yang lebih cerah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikemukakan adalah “Bagaimana strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi terutama berhubungan dengan strategi komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Praktis

Memberikan potret atas strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Cilacap.

E. Kerangka Teori

E.1. Strategi Komunikasi

Menurut Jim Lukaszewski dalam Cutlip, Center, dan Broom (2006: 308), strategi merupakan tenaga penggerak organisasi. Strategi adalah daya intelektual yang membantu mengatur, memprioritaskan, dan mengarahkan gerak organisasi.

Tanpa strategi, organisasi tidak akan memiliki arah, tidak akan mendapatkan momentum yang tepat untuk pergerakannya, dan dengan demikian tidak akan ada hasil. Strategi memberikan arah, menentukan tujuan jangka panjang suatu organisasi, pengambilan rangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah jalan saja, melainkan harus menunjukkan operasionalnya secara taktis harus dilakukan. Komunikasi secara sederhana merupakan proses sosial yang terdiri dari individu-individu saling mempertukarkan makna melalui simbol-simbol tertentu. Strategi komunikasi dengan demikian merupakan perpaduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication manajemen*) untuk mencapai tujuan tertentu (Quinn and Mintzberg, 1991: 5).

Perencanaan komunikasi (*communication planning*) merupakan proses penyusunan konsep komunikasi yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Guna mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi juga harus menunjukkan cara-cara operasionalnya secara taktis harus

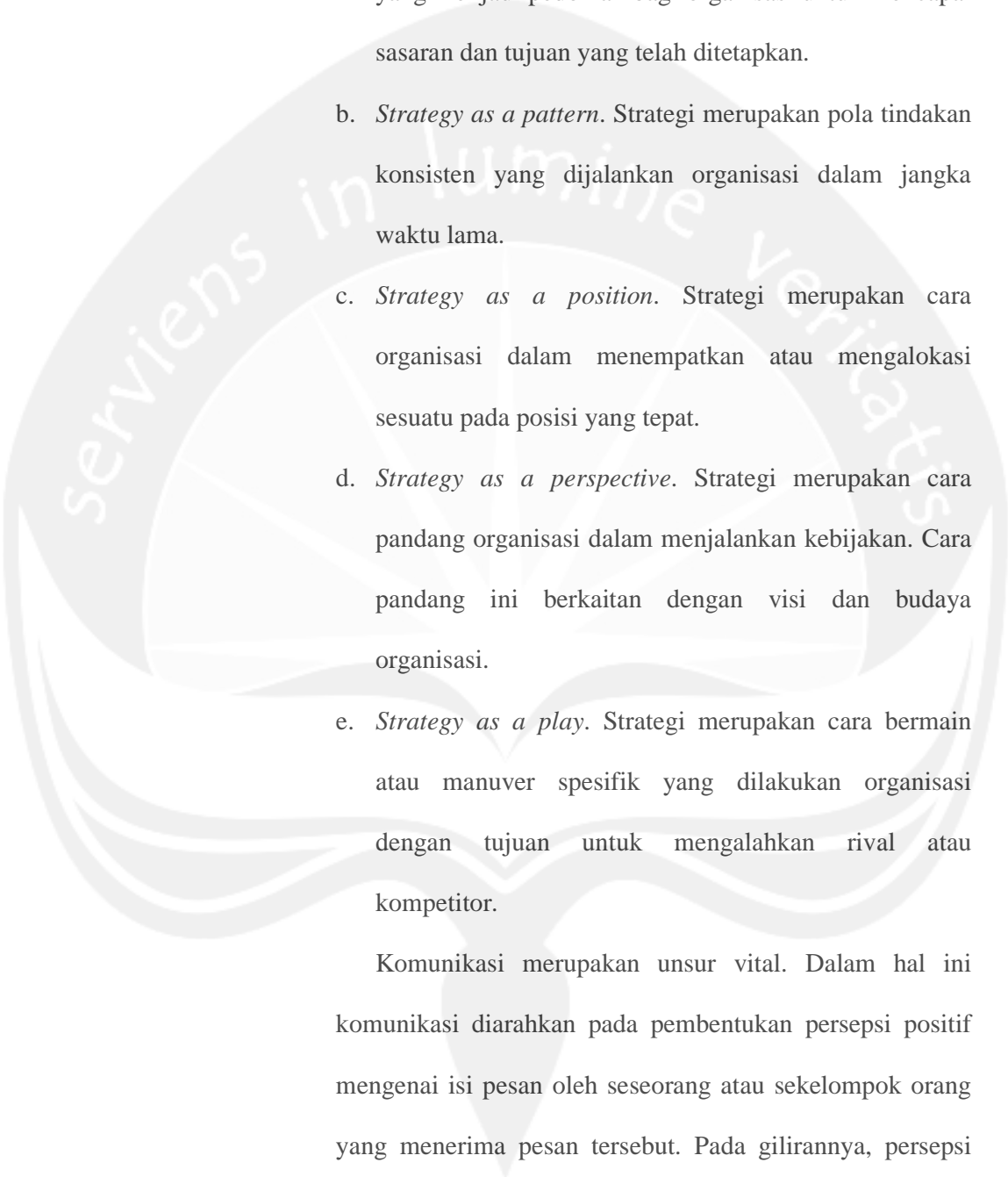
dilaksanakan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung pada situasi dan kondisi (Uchjana, 2002: 83-84). Untuk itulah dibutuhkan fungsi manajemen komunikasi (*communication management*) yang mengatur alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi untuk mendorong dialog dalam masyarakat (Kaye, 1994: 8). Paduan perencanaan dan manajemen komunikasi ini menciptakan strategi komunikasi yang kuat secara konseptual dan operasional, sehingga membuat organisasi lebih siap menghadapi tantangan perubahan lingkungan.

Strategi didefinisikan oleh Quinn dan Mintzberg (1991: 5) sebagai :

...the pattern or plan that integrates an organization's major goals, policies, and action sequences into a cohesive whole. A well formulated strategy helps to marshall and allocate an organization's resources into a unique and reliable posture based on its relative internal competencies and shortcomings, anticipated changes in the environment and contingent more by intelligent opponents.

Sebuah strategi yang terencana dengan baik mampu menyusun dan mengatur sumber-sumber organisasi dalam hasil yang unik dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama berdasarkan kemampuan dan kelemahan internal, mengantisipasi perubahan dan tindakan yang dilakukan rival atau lawan.

Quinn dan Mintzberg (1991: 23) berpendapat bahwa strategi berkaitan dengan lima hal, yaitu :

- 
- a. *Strategy as a plan.* Strategi merupakan suatu rencana yang menjadi pedoman bagi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. *Strategy as a pattern.* Strategi merupakan pola tindakan konsisten yang dijalankan organisasi dalam jangka waktu lama.
 - c. *Strategy as a position.* Strategi merupakan cara organisasi dalam menempatkan atau mengalokasikan sesuatu pada posisi yang tepat.
 - d. *Strategy as a perspective.* Strategi merupakan cara pandang organisasi dalam menjalankan kebijakan. Cara pandang ini berkaitan dengan visi dan budaya organisasi.
 - e. *Strategy as a play.* Strategi merupakan cara bermain atau manuver spesifik yang dilakukan organisasi dengan tujuan untuk mengalahkan rival atau kompetitor.

Komunikasi merupakan unsur vital. Dalam hal ini komunikasi diarahkan pada pembentukan persepsi positif mengenai isi pesan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menerima pesan tersebut. Pada gilirannya, persepsi positif dapat membuat penerima pesantergerak untuk melakukan perubahan sikap sebagai respon positif atas

pesan yang diterima. Fungsi komunikasi tidak melulu berkisar pada masalah *how communication works*, melainkan lebih pada *how to communicate* agar terjadi perubahan sikap (*attitude*), pandangan (*opinion*), dan perilaku (*behavior*) pada sasaran komunikasi, apakah sasaran itu individu (mikro), kelompok (*mezo*), atau masyarakat secara keseluruhan (makro) (Uchjana, 2002: 35).

Aspek komunikasi juga menjadi hal vital dalam proses strategi yang dihubungkan dengan model komunikasi dasar yang dikutip oleh Mulyana (2010: 147), yaitu Formula Harold Laswell : *who says what in which channel to whom with what effect*, yang mengandung unsur-unsur berikut:

- a. *Communicator* harus mampu menyampaikan ide dan kegiatan atau program kerjanya kepada pemiliknya, sehingga publik mampu memahami dan mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh komunikator.
- b. *Message* (pesan) merupakan sesuatu yang perlu disampaikan kepada penerima. Pesan tersebut dapat disampaikan melalui teknik kampanye, di mana penyampaian ide, gagasan, informasi, dan aktivitas

tertentu dipublikasikan dengan tujuan agar publik mengenal, memahami, dan menerima.

- c. *Medium* (media) merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada publik dan sebagai mediator antara komunikator dan komunikan (penerima pesan).
- d. *Receiver* (penerima/ komunikan/ target sasaran) merupakan publik yang menjadi sasaran dalam berkomunikasi. Pemahaman komunikator terhadap komunikan menjadi unsur penting timbulnya rasa saling percaya, toleransi, dan kerjasama untuk memperoleh dukungan.
- e. *Effect*(dampak) merupakan respon atau reaksi setelah berlangsungnya proses komunikasi yang bisa menimbulkan umpan balik atau *feedback* positif atau sebaliknya, respon negatif.

Dalam pemberian materi dari komunikator kepada komunikan dalam jumlah komunikan yang banyak dan memiliki sebuah tujuan ke arah pengembangan, dapat pula disebut dengan pemberian penyuluhan. Penyuluhan sendiri merupakan komunikasi informasi yang dilakukan secara terencana dalam rangkaian upaya pengembangan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap seseorang atau komunitas tertentu. Hakikat penyuluhan sebagai

suatu bentuk edukasi, yaitu pengembangan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap ini pada gilirannya diharapkan mendorong komunitas masyarakat untuk bergerak mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi yang efektif agar pesan berhasil sampai pada khalayak sasaran yang dituju. Strategi komunikasi tersebut antara lain melibatkan berbagai aktivitas komunikasi, seperti penyebaran informasi, pengetahuan, gagasan atau ide untuk membangun kesadaran dan pengertian dalam diri khalayak yang dituju. Dalam hal ini, organisasi dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik serta strategi yang tepat untuk penyampaian pesannya, karena tujuan yang ingin dicapai oleh perubahan pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan tujuan program kerja atau kegiatan tersebut.

Komunikasi menjadi unsur vital yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh organisasi. Setiap organisasi seharusnya memeriksa gaya, kebutuhan, dan kesempatan komunikasinya serta mengembangkan strategi komunikasi yang dapat secara efektif memengaruhi khalayaknya. Organisasi harus tahu cara mengkomunikasikan dirinya dengan baik agar mendapat relasi dan dukungan positif dari berbagai pihak. Pada dasarnya, organisasi yang berbeda akan menggunakan cara komunikasi yang berbeda pula untuk memenuhi kebutuhannya, bergantung pada latar

belakang, visi, dan sasaran organisasi tersebut. Secara umum, komunikasi yang efektif memenuhi aspek tentang bagaimana mengubah sikap (*how to change attitude*), mengubah opini (*to change the opinion*), dan mengubah perilaku (*to change the behavior*).

Menurut Wayne Pace, Brent D, Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam bukunya *Techniques for Effective Communication* (Uchjana, 2002: 32), tujuan strategi komunikasi adalah:

- a. *To secure understanding*. Strategi komunikasi bertujuan untuk memastikan terciptanya saling pengertian dalam berkomunikasi dan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi.
- b. *To establish acceptance*. Strategi komunikasi disusun agar saling pengertian dan penerimaan tersebut terus dibina dengan baik. Setelah komunikan menerima dan mengerti pesan yang disampaikan, pesan tersebut perlu dikukuhkan dalam benak komunikan agar menghasilkan umpan balik yang mendukung pencapaian tujuan komunikasi.
- c. *To motive action*. Strategi komunikasi memberikan dorongan, memotivasi perilaku atau aksi. Komunikasi selalu memberi pengertian yang diharapkan dapat

memengaruhi atau mengubah perilaku komunikan agar sesuai dengan keinginan komunikator.

- d. *To reach the goals which the communicator sought to achieve.* Strategi komunikasi memberikan gambaran cara bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut.

E.2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soetrisno dalam Jacob (2000: 185), pemberdayaan masyarakat atau *empowerment* adalah merubah kondisi program pembangunan yang sudah ada dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang telah dipilihnya, serta memberikan kesempatan pada kelompok orang miskin untuk mengelola dana pembangunan dengan baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain.

Didalam sebuah organisasi tradisional, Saragi (2004: 291) mengatakan bahwa terdapat manusia-manusia tradisional yang bekerja didalamnya. Ciri-ciri manusia tradisional diantaranya tidak memiliki sikap-sikap gerak cepat, tidak mempunyai tujuan. Sebaliknya, ciri-ciri manusia modern yaitu terbuka dengan pengalaman baru, kesediaan untuk menghadapi perubahan sosial,

kesadaran adanya keberagaman pendapat, adanya perspektif waktu masa kini dan masa depan, adanya aspirasi dan orientasi keberhasilan, adanya perencanaan kedepan dan kepercayaan pada suatu dunia yang dapat “diperhitungkan”.

Karakteristik dasar pengembangan organisasi menurut Saragi (2004: 295), antara lain:

- a. Strategi mendidik yang dilakukan untuk perubahan organisasi yang terencana. Apapun bentuk strategi, pengembangan organisasi akan lebih terkonsentrasi pada nilai-nilai, perilaku, hubungan, dan iklim organisasi, variabel manusia sebagai hal yang utama dibandingkan dengan tujuan, struktur dan teknologi yang dimiliki organisasi.
- b. Perubahan dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan ataupun masalah yang dihadapi organisasi. Dalam beberapa kasus, perubahan ini dilakukan sebagai cara untuk mempertahankan hidup dan juga sebagai cara memperbesar atau memperluas usaha yang sedang menghadapi krisis.
- c. Pengembangan organisasi dilakukan atas dasar strategi yang didapat dari pengalaman. Pengalaman yang didapat dari dalam maupun luar organisasi seperti pelatihan, pertemuan diskusi, dan pengalaman lainnya.

Perubahan organisasi, yang dilakukan untuk mengembangkan organisasi, memiliki beberapa faktor penentu kesuksesannya, yakni:

- a. Kepemimpinan dan komitmen dari tim manajemen
- b. Waktu dan ruang gerak untuk menghasilkan kinerja, belajar dan mengkonsolidasikan perubahan
- c. Cukupnya kecakapan dari sumber daya manusia dalam menunjang proses perubahan
- d. Banyak hal yang dapat timbul dalam proses perubahan organisasi, karakteristik masa transisi dalam perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya : penuh rasa ketidakpastian, persepsi yang tidak konsisten dalam diri individu maupun organisasi, stres yang cukup tinggi dalam setiap kelompok, semangat dan energi para anggota organisasi banyak yang tidak tersalurkan, persoalan pengawasan dalam organisasi, perilaku yang lama kembali disukai, konflik yang meningkat terutama antar kelompok (Saragi, 2004: 296).

Dalam perjalanan pemberdayaan di masyarakat, Pranarka dalam Jacob (2000: 185-186) mengatakan bahwa terdapat dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan, yaitu:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan,

atau kemampuan kepada masyarakat agar mampu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian. Proses ini disebut kecenderungan primer.

2. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Menurut Soetrisno dan Dove dalam Jacob (2000: 186), menyebutkan ciri-ciri pemberdayaan masyarakat yang partisipatoris dalam hal pembangunan termasuk pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan ide-ide atau inisiatif yang tumbuh dari bawah dan meluas masuk ke atas ke dalam birokrasi pemerintah.
2. Adanya *bargaining power* masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Adanya sikap para perencana untuk melihat proses perencanaan sebagai *learning process* atau belajar dari pengalaman masyarakat setempat.

Pandangan menurut Margot Breton dalam Eko (2004: 249-250) gagasan pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi

kekuasaan dan pembagian akses sumber daya masyarakat. Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang developmentalisme (modernisasi). Sutoro Eko meyakini bahwa antara pembangunan (lama) dan pemberdayaan (baru) mempunyai cara pandang dan keyakinan yang berbeda pula.

Pada intinya, paradigma lama dalam konteks pembangunan lebih berorientasi pada negara dan modal, sementara paradigma baru yang mengarah ke pemberdayaan lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik, dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola, dan menikmati pembangunan (Eko, 2004: 250).

Tidak ada sebuah pengertian maupun model tunggal pemberdayaan. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor

kehidupan. Ada pula yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi, dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam suatu komunitas (Eko, 2004: 250).

F. Kerangka Konsep

Pemberdayaan dalam penelitian ini masuk ke dalam ranah komunikasi dan lebih fokus ke dalam perubahan perilaku masyarakat di dalam sebuah komunitas. Maka dari itu, berikut pengertian dari strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat dalam budaya kolektivistik menurut peneliti, yaitu: perpaduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memberdayakan masyarakat dengan proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memfasilitasi warga masyarakat yang mana budaya masyarakatnya bersifat kolektif. Di dalam perencanaan komunikasi, maka berbicara tentang proses penyusunan konsep komunikasi dalam pencapaian tujuan dari organisasi (YSBS).

Menurut peneliti, strategi adalah proses penentuan rencana organisasi yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya sedemikian rupa agar tujuan tersebut

dapat tercapai. Strategi memiliki tujuan dalam memberikan arah, menentukan tujuan jangka panjang suatu organisasi, pengambilan rangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Oleh karena itu, strategi komunikasi dilengkapi dengan fungsi manajemen komunikasi, yaitu penentuan tujuan sangat diperlukan dalam mempermudah langkah-langkah selanjutnya; menyusun aksi dan strategi, pokok pertimbangannya adalah cara-cara untuk menghadapi berbagai kondisi yang ada di lapangan (perhitungan modal yang diberikan, pengaturan waktu jangka panjang, sampai ke proses pelaksanaan aksi); penggunaan komunikasi yang efektif, terkait dengan pembina yang akan turun ke lapangan dan materi-materi yang akan diberikan apakah dapat dikomunikasikan dengan baik dan efektif; penetapan teknik komunikasi, disesuaikan dengan strategi komunikasi yang disusun oleh tim, apakah dengan komunikasi tatap muka langsung, atau dialog personal dengan masyarakat, atau pemberitaan di media; implementasi strategi komunikasi, berkaitan dengan pelaksanaan program dan persiapan-persiapan yang dilakukan; evaluasi menurut Grunig dan Hunt dalam Putra (1999: 72) mencakup evaluasi program (untuk melihat apakah program yang telah dibuat oleh tim dikelola dengan baik dan mendapati kelanjutan) dan evaluasi hasil (mengukur dampak yang ditimbulkan dari program KSW).

Komunikasi merupakan unsur vital di dalam sebuah organisasi. Organisasi akan berjalan tergantung dari semua elemen yang ada dan yang

membantu berjalannya komunikasi. Dibutuhkan sebuah perencanaan komunikasi yang mendasarinya. Perencanaan komunikasi (*communication planning*) merupakan proses penyusunan konsep komunikasi yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Guna mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi juga harus menunjukkan cara-cara operasionalnya secara taktis yang harus dilaksanakan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, bergantung pada situasi dan kondisi (Uchjana, 2002: 83-84). Paduan perencanaan dan manajemen komunikasi ini menciptakan strategi komunikasi yang kuat secara konseptual dan operasional, sehingga membuat organisasi lebih siap menghadapi tantangan perubahan lingkungan.

Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain.

Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan, kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator, yang memudahkan unsur-unsur yang lemah memberdayakan dirinya sendiri (Eko, 2004: 256).

Maka dari itu, pengembangan masyarakat secara perlahan dan dilakukan sedini mungkin diharap menunjukkan dampak positif bagi masyarakat desa yang memang memiliki niat untuk bergerak maju. Dikhususkan lebih bagi kaum wanita, karena dirasa bahwa pekerjaan yang bisa dilakukan atau dikerjakan oleh kaum hawa hanyalah berpenghasilan minim dan tidak bisa diandalkan untuk pembiayaan hidup. Namun, YSBS dengan tim KSW sedemikian berupaya untuk membantu memajukan masyarakat desa dengan adanya bantuan yang dimanfaatkan lebih kepada kaum hawa di banyak tempat yang mengikuti program ini.

Faktor partisipasi dari masyarakat memiliki peranan sangat besar karena bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai “obyek”,

melainkan sebaliknya, harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat ditempatkan sebagai “subyek” utama yang harus menentukan jalannya pembangunan secara kolektif.

Menurut Poerwadarminta dalam Alfian (2013: 132) “masyarakat” mengandung makna pergaulan hidup manusia yang terhimpun atau orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu, dan berarti juga orang atau khalayak ramai. Menurut Hasan Sadily yang juga dikutip dalam Alfian (2013: 132), masyarakat adalah “Kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses, dan masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya proses perubahan itu”.

Dengan demikian, masyarakat merupakan lapangan pergaulan antara sesama manusia. Pada kenyataannya, masyarakat juga dinilai ikut memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan dan perilaku manusia yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebutlah, pemikiran tentang masyarakat mengacu pada penilaian berikut.

- a. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang terikat oleh kesatuan dari berbagai aspek, seperti latar belakang budaya, agama, tradisi kawasan lingkungan, dll.
- b. Masyarakat terbentuk dalam keragaman adalah sebagai ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar dalam kehidupan

terjadi dinamika kehidupan sosial, dalam interaksi antar-sesama manusia yang menjadi warganya.

- c. Setiap masyarakat memiliki identitas sendiri yang secara prinsip berbeda satu sama lain.
- d. Masyarakat merupakan lingkungan yang dapat memberi pengaruh pada pengembangan potensi individu (Jalaluddin dalam Alfian, 2013: 133).

Dari beberapa penjelasan di atas, pengertian masyarakat yang dimaksudkan adalah sekelompok manusia yang terdiri atas keluarga, masyarakat, dan adat kebiasaan yang terikat di dalam suatu kesatuan aturan tertentu. Pendapat dari Koentjaraningrat yang dikutip oleh Alfian (2013: 117), kesatuan hidup setempat atau *community* atau komunitas adalah kesatuan sosial yang terjadi bukan karena adanya ikatan kekerabatan, sebagaimana kelompok kekerabatan, melainkan karena ikatan tempat kehidupan. Orang-orang yang tinggal bersama di suatu wilayah tertentu belum dapat dikatakan *community* jika mereka tidak merasakan terikat oleh perasaan bangga dan cinta pada wilayahnya, sehingga mereka segan untuk tinggal di wilayah yang lain.

Sebagai kesatuan manusia, komunitas mempunyai perasaan kesatuan, hampir sama dengan semua kesatuan manusia yang lain, tetapi perasaan kesatuan dalam komunitas biasanya sangat kuat, sehingga rasa kesatuan tersebut mengandung unsur-unsur rasa kepribadian kelompok. Ini artinya bahwa perasaan kelompok itu mempunyai ciri-ciri (biasanya ciri-

ciri kebudayaan atau cara-cara hidup) yang berbeda dengan kelompok lain, serta adanya perasaan negatif, yaitu merendahkan atau paling tidak menganggap aneh ciri-ciri dalam kehidupan komunitas lainnya.

Menurut Soekanto partisipasi dari kaum laki-laki dan perempuan terhadap sesuatu hak akan berbeda. Hal ini terjadi karena adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat yang membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan pada derajat yang berbeda. Perbedaan ini pada akhirnya melahirkan kedudukan dan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di masyarakat. Di samping itu, hal ini juga akan membedakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat (Alfan, 2013: 182).

Menyinggung sedikit mengenai wanita, dalam pandangan dasar dari WID (*Women In Development*) adalah:

- a. Proses pembangunan dan perubahan sosial yang pesat telah menyingkirkan perempuan dari pusat-pusat kegiatan ekonomi.
- b. Karena itu, setiap tahap dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dipikirkan bagaimana mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan itu.
- c. Caranya ialah dengan menciptakan proyek-proyek khusus bagi perempuan yang dapat membantu mereka memperoleh penghasilan sendiri.
- d. Cara lain untuk menembus dinding-dinding yang menghambat proses terintegrasinya perempuan dalam pembangunan ialah

dengan menghilangkan bias kaum laki-laki yang terdapat di tingkat pengambilan keputusan ataupun pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Selain itu, para penganut WID mementingkan strategi penempatan perempuan dalam posisi-posisi kunci di lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga dana tingkat internasional dan nasional (Saptari dan Holzner, 1997: 84).

Hal-hal tersebut diatas sesuai dengan yang pernah dibicarakan oleh Bapak Sumarsono, yakni modal yang digunakan dalam program ini yaitu modal kepercayaan, karena tidak ada tanggungan, dan hal-hal lainnya. Tujuan yang ingin diperoleh adalah berupaya untuk memberdayakan masyarakat, sehingga apabila program sudah berjalan, tim akan berjalan mundur. Dalam artian akan meninggalkan sistem yang telah terbentuk, sehingga masyarakat terutama kaum wanita yang mengikuti program ini sudah mandiri dan memiliki keterampilan dari program-program yang dijalankan tersebut. Maka, tentu saja semua itu bergantung pada prosesberlangsungnya komunikasi.

G. Metodologi Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memiliki pengertian menurut Masyuri dan Zainuddin (2008: 12-13) adalah penelitian yang

pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Dengan demikian walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data – sebut saja kualitas data – tidak terbatas. Menurut Rochiati dalam buku Masyuri dan Zainuddin (2008: 19) penelitian kualitatif adalah sebuah proses *inquiri* yang menyelidiki masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dengan tradisi metodologi yang berbeda. Peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisa kata-kata, melaporkan pandangan atau opini para informan, dan keseluruhan studi berlangsung dalam latar situasi alamiah wajar (*natural setting*).

Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian. Dasar teoritis penelitian kualitatif bertumpu pada pendekatan fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan dan etnometologi (Masyhuri dan Zainuddin, 2008: 22).

G.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Mulyana (2008: 201) definisi studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi sosial. Menurut Daymon dan Holloway (2008: 162) studi kasus adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti (yang bisa jadi kualitatif, kuantitatif, atau kedua-duanya), terhadap satu entitas tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu.

Menurut Creswell (1998: 54) penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu. Studi kasus dalam penelitian ini tidak hanya terfokus mengenai strategi komunikasi tetapi juga terhadap program pemberdayaan masyarakat di dalam KSW.

G.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di kantor Yayasan Sosial Bina Sejahtera, yaitu bertempat di kota Cilacap, Jawa Tengah.

G.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemrakarsa program KSW yang dilakukan oleh pihak YSBS Cilacap, dengan informannya, yaitu direktur YSBS, manajer program KSW, enam pembina (pelatih yang terjun ke lapangan).

G.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik *Focuss Group Discussion* (FGD). Tujuan utama FGD adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang satu tema yang dijadikan fokus penelitian (Idrus, 2009: 110). Penyelesaian tentang masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah masukan diperoleh dan dianalisa. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.

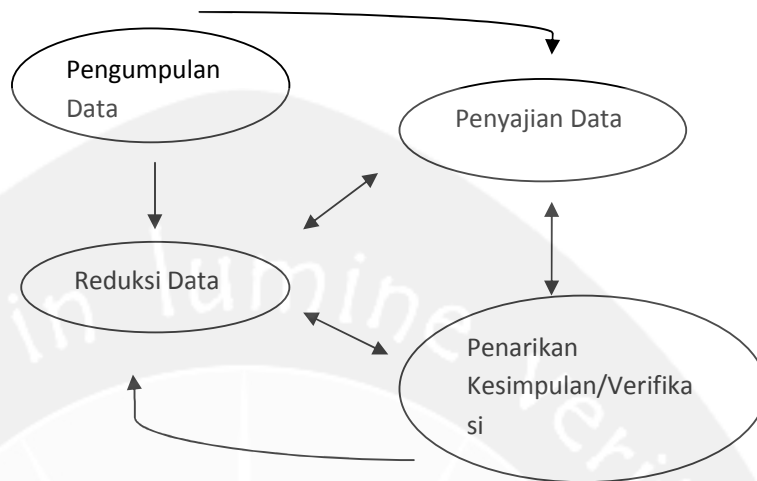
Metode FGD bersifat kualitatif memiliki sifat tidak pasti, berupa eksploratori atau pendalaman terhadap suatu masalah dan tidak dapat digeneralisasi. Secara garis besar FGD bersifat lebih lebar dari wawancara. Jika wawancara menitikberatkan pada pengajuan pertanyaan kepada narasumber atau responden, maka dalam FGD, tidak terdapat pengajuan pertanyaan secara spesifik, namun lebih pada upaya mendengarkan keterangan dari berbagai sumber yang kemudian dirumuskan menjadi suatu data tertentu.

Dalam kasus ini peneliti berusaha mengumpulkan data mengenai suatu topik tertentu dari banyak pihak yang memiliki informasi

mengenai topik tersebut. Masing-masing pihak kemudian mengemukakan pendapat, persepsi dan pemikirannya masing-masing mengenai topik tersebut dalam suatu diskusi. Peneliti menjadi pendengar yang bertugas mengamati dan memfasilitasi jalannya diskusi. Dari diskusi tersebut kemudian dihasilkan suatu pendapat akhir yang mewakili pendapat utama dari masing-masing pihak. Pendapat akhir inilah yang kemudian menjadi data yang lalu dikumpulkan oleh peneliti. Tentu saja dalam FGD, terdapat tingkatan persepsi dan kebiasaan tertentu, sesuai dengan pemikiran masing-masing pihak. Namun dari hal ini didapatkan suatu data yang lebih bersifat deskriptif dan menyeluruh.

G.6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Idrus (2009: 147-148), mengajukan model analisis data yang disebutnya model interaktif. Model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1: Gambaran model interaktif Miles dan Huberman dalam Idrus (2009: 148)

G.7. Kriteria Kualitas Penelitian Kualitatif

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Rejeki (2007: 82-83), mengemukakan kriteria kualitas penelitian dalam tujuan inkuiri paradigma konstruktivisme. Apabila dalam paradigma positivistik (klasik) dikenal kriteria validitas internal dan eksternal, maka dalam paradigma konstruktivisme, kriteria kualitas penelitian yang dikembangkan oleh para pakar/peneliti kualitatif adalah *trustworthiness* (dapat dipercaya) dan *authenticity* (keaslian).

Menurut Newman dalam Rejeki (2007: 82-83), penelitian kualitatif cenderung memakai kriteria *authenticity*, yang berarti memberikan sebuah keterbukaan, kejujuran, dan laporan yang seimbang tentang kehidupan sosial dari sudut pandang seseorang yang tinggal dalam kehidupan tersebut sehari-hari. Dalam kerangka ini, peneliti tidak berfokus pada upaya melihat kesesuaian antara konsep yang abstrak

dengan data empirik, namun lebih berfokus pada upaya untuk memberikan gambaran tentang kehidupan sosial yang dialami oleh mereka yang menjadi subjek penelitian. Sementara itu, seperti dikemukakan oleh Neuman, peneliti kualitatif akan berfokus pada cara untuk menangkap pandangan dari dalam dan memberikan laporan yang rinci tentang peristiwa-peristiwa yang dialami dan dipahami oleh subjek penelitian tersebut.

Dengan mengacu pada Moleong yang dikutip oleh Idrus (2009: 248), untuk pembuktian validitas data penelitian ini ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian. Agar kondisi tersebut dapat terpenuhi dengan cara memperpanjang observasi, pengamatan yang terus-menerus, *triangulasi* dan membicarakan hasil temuan dengan orang lain, menganalisis kasus negatif, dan menggunakan bahan referensi. Adapun untuk reliabilitas dapat dilakukan dengan pengamatan sintesis, berulang, dan dalam situasi yang berbeda.

Lebih lanjut diungkap Denzin dalam Idrus (2009: 145), triangulasi yang dimaksud meliputi: (a) menggunakan sumber lebih dari satu/ganda; (b) menggunakan metode lebih dari satu/ganda; (c) menggunakan peneliti lebih dari satu/ganda; dan (d) menggunakan teori yang berbeda-beda. Muncul pertanyaan, kapan satu data dapat memenuhi kriteria valid dan reliabel yang dikenal dengan data jenuh,

yang berarti kapan dan dimana pun ditanyakan pada informan (triangulasi data), dan pada siapapun pertanyaan sama diajukan (triangulasi subjek), hasil jawaban tetap konsisten sama. Pada saat itulah cukup alasan bagi peneliti untuk menghentikan proses pengumpulan data.

